



**RENCANA KERJA  
( R E N J A )  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2025**



**Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2024**



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

sebagaimana... 4

8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 030);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025-2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2025-2026.

7. Rencana...*q*

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

18. Indikator..

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. Lampiran I : RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Lampiran II : RENJA Dinas Kesehatan;
  - c. Lampiran III : RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Lampiran IV : RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - e. Lampiran V : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Lampiran VI..A

- f. Lampiran VI : RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : RENJA Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Lampiran XI : RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa;
- l. Lampiran XII : RENJA Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII : RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian;
- n. Lampiran XIV : RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI : RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Lampiran XVII : RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : RENJA Dinas Perikanan;
- s. Lampiran XIX : RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. Lampiran XX : RENJA Dinas Peternakan;
- u. Lampiran XXI : RENJA Sekretariat Daerah;
- v. Lampiran XXII : RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat;
- w. Lampiran XXII.1 : RENJA Bagian Hukum;
- x. Lampiran XXII.2 : RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan;
- y. Lampiran XXII.3 : RENJA Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- z. Lampiran XXII.4 : RENJA Bagian Organisasi;
- aa. Lampiran XXII.5 : RENJA Bagian Umum;
- bb. Lampiran XXII.6 : RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah;
- cc. Lampiran XXIII : RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ee. Lampiran XXV : RENJA Badan Pendapatan Daerah;

ff. Lampiran XXVI...4

- ff. Lampiran XXVI : RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : RENJA Inspektorat;
- hh. Lampiran XXVIII : RENJA Kecamatan Lobalain;
- ii. Lampiran XXIX : RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- jj. Lampiran XXX : RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- kk. Lampiran XXXI : RENJA Kecamatan Rote Barat;
- ll. Lampiran XXXII : RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- mm. Lampiran XXXIII : RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- nn. Lampiran XXXIV : RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- oo. Lampiran XXXV : RENJA Kecamatan Rote Timur;
- pp. Lampiran XXXVI : RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- qq. Lampiran XXXVII : RENJA Kecamatan Landu Leko;
- rr. Lampiran XXXVIII : RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- ss. Lampiran XXXIX : RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 3.

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

Perubahan RENJA Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU

Mengesahkan

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

ARISAN TUMASU, SH

NIP. 19700214 200604 1 005

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah	T
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	g

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



MONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	g
Kepala Bapelitbangda	g

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 056

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pernyataannya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rote Ndao.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pada akhirnya kami berharap Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ba'a, ..... Juli 2024  
Kepala DPMD  
Kabupaten Rote Ndao

**Yames M. K. Therik, SH**  
Pembina Tk I  
NIP. 19800429 199903 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penyusunan .....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023.....	11
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	13
2.3. Isu-isi penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .....	15
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5. Penelaan Usulan Program Kegiatan .....	18
<b>BAB III Tujuan dan sasaran .....</b>	<b>21</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	22
<b>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>25</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pelayanan pemerintahan serta pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja, dimana Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan awal Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kewajiban ini di samping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang mana pada periode pembangunan lima tahun terakhir ini (Tahun 2019-2024) menitik beratkan pembangunannya pada pengembangan sektor pariwisata yang didukung oleh sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perikanan.

##### **1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan renja meliputi:
  - (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal  
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan  
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir  
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu

indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

## 6. Penetapan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao menjabarkan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

### **1.1.3. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- 1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan

kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
18. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk memberikan panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi OPD dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran).

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Mendeskripsikan Program – Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao;
2. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal agar lebih fokus pada pencapaian tujuan organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan OPD serta pengawasan selama periode 1 (satu) tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

1. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao ini menyajikan gambaran umum dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2023.
2. Jumlah pagu dana pada DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian APBD murni sebesar **Rp. 2.756.990.650,-** yang dijabarkan ke dalam 4 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Dari jumlah pagu dana tersebut terealisasi sampai triwulan empat tahun 2023 sebesar Rp. 2.695.362.849,-
3. Hasil Evaluasi Kegiatan Renja Triwulan Empat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)						
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K							Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=11/6x100	13 = 5 + 11	14=13/4x100											
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		50,891,046,870	6,502,332,508		2,756,990,650	686,305,590	640,107,451	602,109,367	714,854,701	-	2,695,362,849		9,197,695,357										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11,987,303,420	4,931,244,608		2,149,877,650	645,294,590	422,030,051	426,730,867	556,066,701	-	2,102,107,949		7,033,352,557										
		TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR																						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	212,325,650	124,207,700		91,009,500	17,676,500	31,320,000	17,680,000	24,333,000	-	91,009,500		215,217,200										
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	48 Dok	193,761,650	24	112,207,700	12 Dok	87,990,500	3	15,567,500	3	30,410,000	3	17,680,000	3	24,333,000	12	87,990,500	100.00	100.00	36	200,198,200	75.00	103.32
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja dan Pertriwulan	28 Dok	18,564,000	7	12,000,000	7 Dok	3,019,000	3	2,109,000	2	910,000	-	-	-	-	5	3,019,000	71.43	100.00	12	15,019,000	42.86	80.90
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	10,709,709,440	4,420,478,008		1,827,090,000	600,730,290	350,963,451	376,492,867	458,649,701	-	1,786,836,309		6,207,314,317										
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48 Bulan	10,489,726,737	24	4,325,738,008	12 Bulan	1,780,890,000	3	593,030,290	3	350,963,451	-	353,392,867	-	443,249,701	6	1,740,636,309	50.00	97.74	30	6,066,374,317	62.50	57.83
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelola ABPD dan barang jasa	48 Bulan	219,982,703	24	94,740,000	12 Bulan	46,200,000	3	7,700,000	-	-	-	23,100,000	-	15,400,000	3	46,200,000	25.00	100.00	27	140,940,000	56.25	64.07
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		52,211,250		19,350,000		6,600,000		-		-	4,200,000		2,400,000		6,600,000					25,950,000		
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor pengelola BMD perangkat daerah	48 Bulan	52,211,250	24	19,350,000	12 Bulan	6,600,000	-	-	-	-	4,200,000	-	2,400,000	-	6,600,000	-	100	24	25,950,000	50	49.70	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		599,740,623		185,512,500		137,681,500		15,623,500		26,942,600		21,038,000		16,566,500		132,156,340				317,668,840		
	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Tersedianya Persediaan dan Perlengkapan kantor						57,450,000				-		-	51,985,740		51,985,740							
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan tersedianya barang cetakan dan pengadaan	400 buku	96,210,715	200	48,355,500	100 buku	27,625,500	25	3,915,000	-	12,955,000	-	6,628,000	-	4,127,000	25	27,625,000	25.00	100.00	225	75,980,500	56.25	78.97
7	Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Alat Tulis kantor	48 Bulan	50,920,000	24	28,446,000	12 Bulan	22,474,000	3	3,287,500	3	3,181,600	3	8,946,000	-	7,058,500	9	22,473,600	75.00	100.00	33	50,919,600	68.75	100.00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Ke Provinsi dan Luar Provinsi	60 Kali	452,609,908	30	108,711,000	10 Kali	30,132,000	2	8,421,000	3	10,806,000	-	5,464,000	-	5,381,000	5	30,072,000	50.00	99.80	35	138,783,000	58.33	30.66
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		230,981,178		105,369,400		55,589,650		8,844,300		4,164,000		-		42,240,000		55,248,300				160,617,700		
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan pengadaan materai	48 Bulan	19,376,175	24	8,348,000	12 Bulan	4,164,000	-	-	6	4,164,000	-	-	-	-	6	4,164,000	50	100	30	12,512,000	63	64.57
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet listrik dan air	48 Bulan	211,605,003	24	97,021,400	12 Bulan	51,425,650	3	8,844,300	-	-	-	-	-	42,240,000	3	51,084,300	25.00	99.34	27	148,105,700	56.25	69.99

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36	182,335,279	18	76,327,000	7	31,907,000	1	2,420,000	3	8,640,000	-	7,320,000	-	11,877,500	-	30,257,500	57.14	94.33	22	106,584,500	61.11	59.11
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 1 Unit Roda 4, 6 unit roda 2) Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	36	163,789,717	18	69,379,000	7	29,090,000	1	2,420,000	3	8,640,000	-	7,320,000	-	9,060,500	4	27,440,500	57.14	94.33	22	96,819,500	61.11	59.11
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	64	18,545,562	32	6,948,000	9	2,817,000	-	-	-	-	-	-	-	2,817,000	-	2,817,000	-	100.00	32	9,765,000	50	52.65
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>MENINGKATNYA PENATAAN DESA</b>		<b>36,711,562,000</b>		<b>185,000,000</b>		<b>69,456,600</b>		<b>3,336,000</b>		<b>17,340,000</b>		<b>34,226,000</b>		<b>11,017,000</b>		<b>65,919,000</b>				<b>250,919,000</b>		
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa		36,711,562,000		185,000,000		69,456,600		3,336,000		17,340,000		34,226,000		11,017,000		65,919,000				250,919,000		
13	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan Desa Persiapan	100	36,711,562,000	50	185,000,000	25	69,456,600	-	3,336,000	-	17,340,000	-	34,226,000	-	11,017,000	-	65,919,000	-	94.91	50	250,919,000	50	0.68
		Terlaksananya Ranperda					22																	
<b>III</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA</b>	<b>MENINGKATNYA PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>642,666,600</b>		<b>359,336,100</b>		<b>224,516,000</b>		<b>25,051,000</b>		<b>106,510,000</b>		<b>61,238,000</b>		<b>30,404,500</b>		<b>223,203,500</b>				<b>582,539,600</b>		
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan		642,666,600		359,336,100		224,516,000		25,051,000		106,510,000		61,238,000		30,404,500		223,203,500				582,539,600		
14	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan Desa ( RKPDes)	112	253,085,100	112	179,336,300	112	29,442,000	-	-	-	26,744,000	-	2,698,000	-	29,442,000	-	100	112	208,778,300	100	82		
15	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD)	112	289,829,500	112	79,999,800	112	138,869,000	-	18,846,000	-	53,536,000	-	42,760,000	-	22,414,500	-	137,556,500	-	99.05	112	217,556,300	100	75
16	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya fasilitasi Badan Usaha Milik Desa	40	99,752,000	20	100,000,000	10	56,205,000	-	6,205,000	-	26,230,000	-	15,780,000	-	7,990,000	-	56,205,000	-	100.00	20	156,205,000	50	157

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2024 (%)		
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	1,549,514,850	5	1,026,751,800	6	313,140,400	7	12,624,000	8	94,227,400	9	79,914,500	10	117,366,500	11=7+8+9+10	304,132,400	12=11/6x100	13 = 5 + 11	1,330,884,200	14=13/4x100			
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PRESENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF		1,549,514,850		1,026,751,800		313,140,400		12,624,000		94,227,400		79,914,500		117,366,500	-	304,132,400				1,330,884,200			
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,549,514,850		1,026,751,800		313,140,400		12,624,000		94,227,400		79,914,500		117,366,500	-	304,132,400				1,330,884,200			
17	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	96 Desa	450,000,000	96	137,039,900	54 Desa	6,395,000	-	6,395,000	-	-	-	-	-	-	-	6,395,000	-	100.00	96	143,434,900	100	31.87	
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lemabaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Lomba Desa dan Pokjnal Posyandu	16 Posyandu	333,616,500	8	335,532,900	4 Posyandu	197,792,000	-	2,829,000	-	73,959,000	-	55,421,000	-	65,310,000	-	197,519,000	-	99.86	8	533,051,900	50	159.78	
19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan ( Pemberian Bantuan Mesin Las)	12 Kelompok	329,958,050	6	130,000,000	5 Kelompok	8,953,400	-	3,400,000	-	4,543,400	-	-	-	-	-	7,943,400	-	88.72	6	137,943,400	50	41.81	
20	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan PKK	48 Bulan	435,940,300	24	424,179,000	2 Bumdes 12 Bulan	100,000,000	-	-	-	15,725,000	-	24,493,500	-	52,056,500	-	92,275,000	-	92	24	516,454,000	50	118.47	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>				<b>50,891,046,870</b>		<b>6,502,332,508</b>		<b>2,756,990,650</b>		<b>686,305,590</b>		<b>640,107,451</b>		<b>602,109,367</b>		<b>714,854,701</b>	-	<b>2,695,362,849</b>	<b>26.43</b>	<b>97.76</b>		<b>9,197,695,357</b>	<b>62.49</b>	<b>18.07</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>SR</b>	<b>ST</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja			: Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja			: Perlu peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																						
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan meningkatkan kinerja																						
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya			:																						

4. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 dapat di lihat pada Tabel 2.1.1. berikut:

Tabel 2.1.1

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPMD S/D TAHUN 2024 KABUPATEN ROTE NDAO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET RENJA	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN	
			CAPAIAN	TARGET KINERJA	TARGET RENJA	REALISASI	TINGKAT	TARGET RENJA	REALISASI	TINGKAT
			PROGRAM	HASIL PROGRAM	PERANGKAT	RENJA TAHUN	REALISASI	REALISASI (%)	PERANGKAT	TAHUN 2024
DAERAH TAHUN	DAERAH S/D	DAERAH S/D	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	
2024)	TAHUN 2022	TAHUN 2023	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)		
4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)			
TARGET TAHUN	REALISASI 2021 +	TARGET 2023	REALISASI	RUMUS	TARGET TAHUN	RUMUS	RUMUS			
Indikator lama	2022	REALISASI 2023	REALISASI	TARGET TAHUN	RUMUS	RUMUS	RUMUS			
(2021 + 2022)	2022	REALISASI 2023	REALISASI	TARGET TAHUN	RUMUS	RUMUS	RUMUS			
Indikator Baru	2022	REALISASI 2023	REALISASI	TARGET TAHUN	RUMUS	RUMUS	RUMUS			
(2023 + 2024)	2022	REALISASI 2023	REALISASI	TARGET TAHUN	RUMUS	RUMUS	RUMUS			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	80	80
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	#REF!	%	#REF!	%	#REF!	%	#REF!	#REF!
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	38 Dok	19 Dok	19 Dok	19	100	19 Dok	38	100
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12 Dok	12 Dok					12	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	24 Dok		12 Dok	12	100	12 Dok	24	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPI, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7 Laporan	7 Dok					7	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan		7 Laporan	7	100	7 Laporan	14	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97 Org/Bln	23 Org/Bln	25 Org/Bln	25	100	26 Org/Bln	74	76
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	46 Org/Bln	23 Org/Bln					23	50
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Org/Bln		25 Org/Bln	25	100	26 Org/Bln	51	100
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD dan Barang Jasa	4 Org/Bln	4 Org/Bln					4	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok		1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dok	2 Org/Bln	1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	2 Org/Bln	2 Org/Bln					2	100
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok		1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
4										
6										
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	132	132
7										
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 bh	12 bh					12	50
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	5	100	5 Paket	10	100
10	Penyediaan Bahan Bahan Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	1	12 Bulan	36	300
		Jumlah bahan material yang di sediakan	12 Bulan	12 Bulan					12	100
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Buku	100 Buku					100	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 buku		100 buku	100	100	100 buku	200	200
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	20 Kali	10 Kali					10	50
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali		20 Laporan	10	50	2 Laporan	12	60
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan materai	24 bh	12 bh	12 bh	100	8	100 %	212	883
		Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	17 bh	17 bh						
		Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bh		1 Laporan	1	100	1 Laporan	2	17
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 %	28 %	25 %	16	64	23 %	67	100
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	14 Unit	14 Unit					14	100
		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	14 Unit	7 unit	7	1	7 unit	28	200
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	18 Unit		9 unit		9		0	0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	18 Unit		9 Unit	9	100	16 Unit	25	139

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	REALISASI RENJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Meningkatnya Penataan Desa</b>	<b>50 %</b>	<b>22 %</b>	<b>100 %</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>	<b>2200</b>	<b>100</b>
8	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa	50 %	22 %	100 %	22	22	100 %	2200	4400
19	Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan Desa Persiapan	50 desa	22 Dok	100 %				22	44
		Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	25 desa		25 desa	22	1	100 %	122	1
<b>III</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan	112 Laporan	112 Dok	112 Laporan	112	100	112 Laporan	336	3
30	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RKPDES)	224 desa	112 Dok	112 Laporan	112			224	100
		Jumlah Dokumen Hasil fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224 desa	112 Dok	112 Laporan	112				
31	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	112 desa	112 Dok	112 Laporan	112			224	200
		Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	112 desa	112 Dok	112 Laporan	112	100	40 Laporan	264	236
32	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	112 desa	112 Dok					112	100
33	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	112 desa	112 dok	112	112	100	112 desa	336	300
		Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	4 posyandu	4 posyandu					4	100
		Jumlah Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	4 Posyandu	4 Posyandu	4	4	100	4 posyandu	12	300
34	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa	10 Bumdes	10 Dok	10 Dok	10	100	10 bumdes	30	300
35		Jumlah Dokumen hasil pembinaan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa	10 Bumdes	10 Dok	10 Dok	10	100	10 bumdes	30	300
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKIM ADAT</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum adat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	192 Dokumen	1 dokumen	108 Dokumen	200	185	55 Dokumen	256	133
43	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan PendayagunaanKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	96 Dokumen	54 dokumen	54 Dokumen	100	185	54 Dokumen	208	217
44		Jumlah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan PendayagunaanKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	96 Dokumen		54 Dokumen	100	185	1 Dokumen	101	105
17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Lomba Desa dan Pokjanal Posyandu	16 posyandu	4 posyandu	4 posyandu	100	2500	4 posyandu	104	650
45		Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 posyandu		4 posyandu	100		4 Posyandu	104	650
18	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pelatihan Keterampilanusaha industri Kerajinan	5 Kelompok	4 Kelompok	100 %	100	100	100 %	204	4080
46		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Kelompok	4 Kelompok	100 %	100	100	4 Kelompok	108	2160
47		Pelatihan Pembuatan daun Kelor								
19	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitas penguatan kelembagaan PKK	12 Dokumen	12 dokumen	12 Laporan	12	100	12 Laporan	36	300
49		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Laporan		12 Laporan	12	100	12 Laporan	24	200
52										
			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao ini menyajikan gambaran umum dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama kurun waktu tahun anggaran 2023.

## **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dikategorikan “tercapai”, Secara rinci pencapaian tersebut dapat dipaparkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	TARGET IKU	TARGET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI TAHUN		CATATN ANALISIS
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Desa Membangun		✓		100	100	100	100	100		0.6727	0.6727	
2	Persentase Desa Maju dan Berkembang		✓		73.21	74.50	77.86	84.21	73.21		84.21	84.21	
3	Realisasi APBDes		✓		100	100	100	100	100		100	100	
4	Persentase Bumdes Berkembang		✓		28.57	28.57	33.33	38.10	20.95		33.33	33.33	

## **2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mengalami hambatan/permasalahan yang dapat diidentifikasi melalui faktor lingkungan strategis yaitu lingkungan internal dan eksternal meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/ancaman (*threats*) serta melakukan analisa atas asumsi strategis dengan metode SWOT. Sehingga dalam mendukung Visi Misi Bupati Periode 2019-2024 maka dapat menjawab tantangan pengembangan Pemberdayaan Desa lima tahun kedepan untuk kekurangan maupun kelemahan yang ada dibidang Pemberdayaan Desa.

Beberapa isu prioritas sebagai isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada saat sekarang antara lain:

- a. Optimalisasi dan APBD dalam pembangunan Desa untuk mengurangi kemiskinan Ekstrem;
- b. Refitalisasi dan Optimalisasi BUMDES untuk Meningkatkan PAD Desa;
- c. Refitalisasi dan Optimalisasi Posyandu untuk membantu mengurangi kematian Ibu dan Anak dan mencegah stunting;
- d. Optimalisasi Sumber Daya Alam Lokal dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain asumsi strategis di atas, maka beberapa perubahan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatkan upaya dalam membangun desa yang di dukung oleh ADD dan DD;
- b. Perbaiki Bumdes dalam Menambah PAD Daerah;
- c. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam upaya pelaksanaan Pelayanan Posyandu bagi Ibu dan anak balita;
- d. Perlunya bimbingan dalam upaya keterampilan industry sumber daya lokal untuk pemberdayaan masyarakat.

## 2.2. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat 4 program yang tercantum dalam Renja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintah Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 Kabupaten Rote Ndao serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamaka pada tahun 2025 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Pada tahun 2025 telah direncanakan 4 program dengan 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. **2.676.694.981,-**. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada table 2.3 berikut :



Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi		Volume	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Catatan Penting	
			Kecamatan	Desa/Kelurahan			Rencana 2025-2026	Rencana 2025	Hasil Forum Perangkat Daerah			
2	13 01 2.03 2 13 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lobalain	Lekunik	4	Dokumen	45,240,000	45,240,000	45,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.03 2 13 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
2	13 01 2.06 2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lobalain	Lekunik	12	Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.06 2 13 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2	13 01 2.06 2 13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penceranaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lobalain	Lekunik	12	Paket	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.06 2 13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lobalain	Lekunik	1	Paket	42,000,000	42,000,000	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.06 2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lobalain	Lekunik	12	Paket	20,500,000	20,500,000	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.06 2 13 01 2.06 0009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lobalain	Lekunik	10	Laporan	52,426,305	52,426,305	52,426,305	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.08 2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	%	40,000,000	40,000,000	40,000,000		
2	13 01 2.08 2 13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lobalain	Lekunik	12	Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13 01 2.08 2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Atr dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Atr dan Listrik yang Disediakan	Lobalain	Lekunik	12	Laporan	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi		Volume	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Catatan Penting										
			Kecamatan	Desa/Kelurahan			Renstra 2025-2026	Renja 2025	Hasil Forum Perangkat Daerah												
2	13	04	2.01	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	11	Kec	Semua Kel/Desa	14	Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
								0008	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek Kepala Desa, Bpd, Operator Siuskedes)	11	Kec	Semua Kel/Desa	11	kec	11,000,000	11,000,000	11,000,000			
								0008	Penyelenggaraan Pemihhan, Penganggaran dan Pembentukan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemihhan, Penganggaran dan Pembentukan Kepala Desa	11	Kec	Semua Kel/Desa	4	kepala desa	40,000,000	40,000,000	40,000,000			
									0013	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	11	Kec	Semua Kel/Desa	112	Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13	04	2.01	2	13	04	2.01	0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11	Kec	Semua Kel/Desa	4	Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	13	05	2	13	05				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</b>	11	Kec	Semua Kel/Desa	100	%	<b>275,727,500</b>	<b>275,727,500</b>	<b>275,727,500</b>			
										<b>Persentase PKK Aktif</b>	11	Kec	Semua Kel/Desa	100	%						
										<b>Persentase Penguatan dan Keterampilan dalam berinovasi</b>	11	Kec	Semua Kel/Desa	100	%						



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi		Volume	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Catatan Penting
			Kecamatan	Desa/Keleurahan			Renstra 2025-2026	Renja 2025	Hasil Raporan Perangkat Daerah		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam bernovasi	Lobalain	Lekunik	5	Kelompok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	11 kec	Semua ke/Desa	11	Kec	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan PKK	11 kec	Semua ke/Desa	12	bulan	100,682,500	100,682,500	100,682,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
<b>TOTAL</b>							<b>2,676,694,981</b>	<b>2,676,694,981</b>	<b>2,676,694,981</b>		

## 2.1. Penelaah Usulan Program Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao menampung semua usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait yang langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan serta dari hasil inventarisir pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas, hasil Tabel 4

Table 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Rote Ndao

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)</b>	<b>Meningkatnya Penataan Desa</b>	<b>100%</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa	100 %	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	22 Desa	
2	<b>Program Administrasi Pemerintah Desa</b>	<b>Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)</b>	<b>Persentase pendampingan pengelolaan keuangan dan asset desa</b>	<b>100%</b>	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa	100%	
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	112 desa	

	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	112 Desa	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar Desa	14 Bumdes	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek kepala Desa, BPD, Operator Siuskedes)	47 Kepala desa	
	Fasilitas Pengelolaan Aset	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	11 Kec	
	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	4 Paket	
3	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	<b>Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif</b>	100 %	
			<b>Persentase pengetahuan dan keterampilan dalam berinovasi</b>	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum adat	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain	Persentase Peningkatan Kapasitas KPM	100 %	
	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan PendayagunaanKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	11 Kec	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain	JumlahLembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	1 Lembaga	

	Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Berinovasi	5 Bulan	
	Fasilitas Bulan Bahti Gotong Royong	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bulan Bahkti Gotong Royong	11 Kec	
	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain	Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan PKK	12 Bulan	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Menentukan arah kebijakan dan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu disinergikan dengan arah kebijakan Pembangunan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan desa Nyang tergambar dalam table 3.1

**Tabel. 3.1**  
**Telahan Terhadap Kebijakan Ditjen Bina Pemerintah Desa**  
**Kemendagri RI terhadap Tupoksi Dinas PMD**

SASARAN KEBIJAKAN DITJEN BINA PEMERINTAH DESA	PERMASALAHAN DINAS PMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya aparatur pemerintahan yang terampil</li> <li>• Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan keluraha</li> <li>• Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</li> <li>• Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal</li> <li>• Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi internal yang belum optimal</li> <li>• Sarana prasarana pendukung yang belum memadai</li> <li>• Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal</li> <li>• Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kel</li> <li>• Minimnya Pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>• Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMD</li> <li>• Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pembinaan terhadap desa/kel</li> <li>• Kebijakan pemerintahan pusat dalam memperkuat desa.</li> </ul>

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 memiliki tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut:

Tabel 3  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Masyarakat		Persentase Desa Maju dan Berkembang	<b>77.86 %</b>
		Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	<b>100 %</b>
			Persentase Posyandu Aktif	<b>100 %</b>
			Persentase Desa siaga aktif	<b>100 %</b>
			Realisasi Apbdes	<b>100 %</b>
			Persentase Bumdes Berkembang	<b>38.10%</b>

Tabel 3 setelah perubahan sesuai Renstra 2019-2025

Tabel 3  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Masyarakat		Indeks Desa Membangun	<b>0.66.36 %</b>
		Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Maju dan Berkembang	<b>77.86 %</b>
			Realisasi Apbdes	<b>100 %</b>
			Persentase Bumdes Berkembang	<b>38.10 %</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 4 berikut :

Tabel 4

## Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMD Kabupaten Rote Ndao

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5 01	PERENCANAAN			2,676,694,981				2,676,694,981	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,199,977,481		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	2,199,977,481	
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %		
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %		
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %		
2 13 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	16 Dokumen	60,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Dokumen	60,000,000
2 13 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	53,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	53,000,000
2 13 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Laporan	7,000,000
2 13 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	32 Org/Bln	1,905,640,576	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Org/Bln	1,905,640,576
2 13 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bln	1,860,400,576	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Org/Bln	1,860,400,576
2 13 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	45,240,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	45,240,000
2 13 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	12 Dokumen	7,200,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	7,200,000
2 13 01	2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	7,200,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	7,200,000
2 13 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	143,936,905	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	143,936,905
2 13 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	4,500,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	4,500,000
2 13 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	42,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	42,000,000
2 13 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	21,500,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Paket	21,500,000
2 13 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,510,600	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	23,510,600
2 13 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	52,426,305	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Laporan	52,426,305

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	40,000,000
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3,000,000
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	37,000,000
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %	43,200,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	43,200,000
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	43,200,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	43,200,000
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Unit	
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Unit	
2 13 02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>MENINGKATNYA PENATAAN DESA</b>	<b>100 %</b>	<b>69,690,000</b>		<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>69,690,000</b>
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa	100 %	69,690,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	69,690,000
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	22 desa	69,690,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 desa	69,690,000
2 13 02	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA</b>	<b>100 %</b>	<b>131,300,000</b>	<b>(Kab. Rote Ndao , Provinsi NTT dan Luar Daerah, KAB. ROTE NDAO)</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>131,300,000</b>
		<b>Persentase Pemberdayaan Bumdes</b>	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa	100 %	131,300,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Laporan	131,300,000
2 13 04 2.01 03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	112 Dokumen	20,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	112 Laporan	20,000,000
2 13 04 2.01 04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	112 Dokumen	15,300,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	112 Laporan	15,300,000

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar Desa	14 Dokumen	20,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Laporan	20,000,000
2 13 04 2.01 09	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek kepala Desa, BPD, Operator Siuskedes)	11 kecamatan	11,000,000	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Laporan	11,000,000
2 13 04 2.02 02	Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	47 Desa	40,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	47 Laporan	40,000,000
2 13 04 2.02 13	Fasilitas Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	112 Dokumen	10,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	112 Laporan	10,000,000
2 13 04 2.02 18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	15,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Laporan	15,000,000
2 13 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>275,727,500</b>	<b>Kantor PMD Kab Rote Ndao</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>275,727,500</b>
		<b>Persentase PKK Aktif</b>	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
		<b>Persentase pengetahuan dan keterampilan dalam berinovasi</b>						
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas KPM	100 %	275,727,500	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	275,727,500
2 13 05 2.01 02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan PendayagunaanKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan PendayagunaanKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	11 Kec	35,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	11 Laporan	35,000,000
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga	80,045,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	1 Laporan	80,045,000
2 13 05 2.01 06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Berinovasi	5 Kelompok	10,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	5 Dokumen	10,000,000
2 13 05 2.01 07	Fasilitas Bulan Bahti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bulan Bahti Gotong Royong	11 Kec	50,000,000	(Kantor DPMD Kab. Rote Ndao, Lobalain)	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	11 Rekomendasi	50,000,000
2 13 02 2.02 08	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan PKK	12 bulan	100,682,500	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan LuarNTT)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 %	100,682,500

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting dalam rangka menjembatani kepentingan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya yang disesuaikan dengan kondisi, potensi serta karakteristik daerah dengan tetap mengindahkan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik.

Semoga dengan tersusunnya Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan akan memudahkan arah kerja staf dalam upaya pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya benar-benar terwujud, selanjutnya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan.

Demikian gambaran Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao ini kami buat dengan segala kekurangan dan kelemahannya, namun demikian kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa mendatang.

Ba'a, .....Juli 2024  
Kepala DPMD  
Kabupaten Rote Ndao

**Yames M. K. Therik, SH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 198004291999031001